

Membudidayakan dan Mengembangkan Semangat Berwirausaha di Kalangan Mahasiswa

Zulfan Sam

Dosen Pascasarjana Ilmu Pengetahuan Lingkungan, Universitas Riau, Indonesia

Korespondensi penulis: zulfansaam01@gmail.com*

Abstract. *The Indonesian population is a group with a very small percentage involved in entrepreneurship. The entrepreneurial spirit among students is also still small. The mindset of Indonesian college graduates mostly wants to work as civil servants or employees of other private companies and rarely wants to work as entrepreneurs. This article aims to describe and discuss the concept of entrepreneurship and the efforts needed to foster an entrepreneurial spirit among students. This research is a literature study by reviewing the ideas of the literature and subjective observations of researchers and then analyzing them inductively and deductively. Based on the discussion of this article, it can be concluded that (a). Entrepreneurs dare to start a business or business by utilizing all available resources; (b) entrepreneurs have self-confidence, are responsible and persistent, like challenges, are brave, think far ahead, and are not easily satisfied; (c). Entrepreneurship can be learned through talk shows, seminars, workshops, reading entrepreneurship books, and reading biographies of successful entrepreneurs. (d). A good business has standardized feasibility, easily accessible location, affordable price, good quality food and beverage or products, and adequate facilities such as prayer room, electrical contact, and wifi.*

Keywords: *cultivation, entrepreneurship, students*

Abstrak. Penduduk Indonesia termasuk golongan yang sangat kecil persentasenya yang berkecimpung di bidang kewirausahaan atau entrepreneurship. Jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa juga masih sedikit. Pola pikir lulusan perguruan tinggi Indonesia sebagian besar ingin bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau karyawan perusahaan swasta lainnya dan jarang yang ingin bekerja sebagai wirausahawan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membahas tentang konsep kewirausahaan dan upaya yang diperlukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan cara mengkaji gagasan-gagasan pustaka dan pengamatan subjektif peneliti kemudian menganalisis secara induktif dan deduktif. Berdasarkan pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa (a). Wirausahawan berani memulai usaha atau bisnis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada; (b) wirausahawan memiliki sifat percaya diri, bertanggung jawab dan ulet, menyukai tantangan, pemberani, berpikiran jauh ke depan, dan tidak cepat merasa puas; (c). Kewirausahaan dapat dipelajari melalui talkshow, seminar, workshop, membaca buku-buku kewirausahaan, dan membaca biografi wirausahawan yang sukses. (d). Bisnis yang baik memiliki kelayakan yang terstandarisasi, lokasi yang mudah diakses, harga yang terjangkau, makanan dan minuman atau produk yang berkualitas baik, dan fasilitas yang memadai seperti mushola, kontak listrik, dan wifi.

Kata kunci: budidaya, berwirausaha, Mahasiswa

1. PENDAHULUAN

Tren perkembangan wilayah di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan penduduk seperti di negara berkembang lainnya yang berlangsung sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini berimplikasi pada meningkatnya tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari aspek kualitas maupun kuantitas (Syam, 2017)

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan antara lain terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana serta belum meratanya penyebarannya bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator dalam mengukur hal tersebut adalah seiring dengan meningkatnya konsentrasi lingkungan permukiman, tidak diimbangi dengan

peningkatan sarana dan prasarana penunjang permukiman. Pemerintah harus tanggap dan mencari solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat (Joenso & Sari, 2020).

Pembangunan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, seperti yang terjadi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ini menimbulkan beberapa tantangan, salah satunya adalah meningkatnya tuntutan akan sarana dan prasarana yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di beberapa wilayah perkotaan dan pedesaan, hal utama yang muncul adalah terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana serta ketimpangan distribusi di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator utama dari permasalahan ini adalah semakin banyaknya permukiman yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana yang memadai.

Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk tanggap dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan dalam kompleks masyarakat yang semakin beragam.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Pasar Cerenti . Kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas lingkungan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti saluran drainase yang tersumbat oleh sampah, pengelolaan sampah yang kurang, dan minimnya fasilitas umum yang dapat menunjang kehidupan bermasyarakat. Penurunan kualitas lingkungan ini mencerminkan permasalahan yang berkaitan dengan kondisi perumahan dan infrastruktur di kawasan tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui beberapa program, antara lain perbaikan permukiman, infrastruktur jalan, dan sanitasi, serta penyediaan fasilitas MCK dan air bersih. Akan tetapi, kawasan ini masih menghadapi beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas meskipun telah dilakukan berbagai upaya.

Pasar Cerenti juga mengalami dampak urbanisasi yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan yang akan berdampak pada semakin banyaknya perumahan. Sebagian besar permukiman di wilayah ini merupakan permukiman yang tidak terencana seperti perkampungan lain di kota-kota Indonesia. Dengan adanya program penanganan permukiman kumuh seperti 100-0-100 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Akan tetapi, meskipun tingkat permukiman kumuh di Kecamatan Pasar Cerenti sudah mulai menurun , namun wilayah ini belum sepenuhnya memenuhi standar permukiman layak dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Pasar Cerenti dan merumuskan strategi penanganan yang efektif untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan masyarakat di kawasan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk merancang kebijakan pembangunan dengan baik agar permukiman kawasan di Kecamatan Pasar Cerenti dapat menjadi lingkungan yang layak huni, dan berkelanjutan.

Selain itu, meskipun terjadi penurunan luas permukiman kumuh di Kecamatan Pasar Cerenti, kawasan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan dan pengelolaan prasarana yang ada. Penelitian ini juga akan menggali persepsi faktor-faktor terkait yang mempengaruhi keberlanjutan permukiman kumuh dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kondisi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Rekomendasi yang diharapkan meliputi penyusunan rencana yang komprehensif untuk perbaikan prasarana permukiman, perbaikan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, serta peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung program peningkatan kualitas lingkungan di kawasan tersebut.

2. TINJAUAN TEORITIS

Salah satu permukiman kumuh yang terdapat di Kota Banjarmasin. Permasalahan di perkotaan Kota Banjarmasin disebabkan oleh karakteristik lahan basah atau gambut yang terdapat di wilayah lahan perkotaan di Kota Banjarmasin, memiliki permasalahan lingkungan dan bencana. Misalnya tidak jarang ditemukan keberadaan bangunan baik bangunan bertingkat maupun permukiman yang mengalami kondisi miring bahkan ambruk akibat terjadinya penurunan muka tanah serta penyebaran kebakaran akibat bencana kebakaran satu rumah sangat cepat terjadi dikarenakan kepadatan bangunan permukiman dan jenis material bangunan yang digunakan didominasi kayu, menurut hasil data yang dihimpun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Persebaran permukiman kumuh Kecamatan Belitung Selatan terbagi dalam 10 RT. Yaitu: pada kategori permukiman kumuh ringan sebanyak 9 Rukun Tangga (RT 4,8,9,10,11,12,13,14,15) dan permukiman kumuh sedang 1 Rukun Tangga (RT 6), dengan luas permukiman kumuh pada 10 RT tersebut sebesar 6,04 Ha. Permukiman kumuh tersebut terdiri atas sebanyak 480 Unit rumah dengan sebaran jumlah penduduk sebanyak 1.920 jiwa di wilayah permukiman kumuh Kecamatan Belitung Selatan. Kecamatan Belitung Selatan

termasuk dalam wilayah permukiman kumuh perkotaan dengan kondisi bangunan yang padat. Kondisi jaringan jalan terbagi atas dua jenis jaringan akses, yaitu dengan cara cor serta kondisi perkerasan jalan kurang baik dan adanya jembatan kayu yang digunakan untuk permukiman penduduk di sepanjang sungai dan daerah rawa. Lingkungan sanitasi pada wilayah tersebut berupa permukiman kumuh di bantaran sungai. Masyarakat masih menggunakan jamban terapung dan MCK komunal yang kondisinya kurang baik. Sistem pembuangan sampah di Kecamatan Belitung Selatan masih menggunakan sistem penimbunan dan pembakaran sampah secara individu di setiap RT (Wimardana, 2016)

Jadi, banyak sekali permasalahan di kawasan kumuh pesisir Kota Tarakan; di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan untuk menata kawasan pesisir, namun belum berhasil. Penataan secara maksimal baru dapat dilakukan setelah terjadinya kebakaran dengan konsep konsolidasi lahan (LC). Permukiman di sekitar lokasi kebakaran yang terlihat kumuh akan diperbaiki dengan penimbunan dan renovasi saja karena akan ada akses jalan yang mudah di sekitar lokasi kebakaran. Berdasarkan hal tersebut, kata Matter, pembukaan akses jalan infrastruktur pembangunan merupakan salah satu solusi untuk perbaikan kawasan kumuh pesisir (Julianto & Jumario, 2017)

Keputih merupakan salah satu kecamatan di Kecamatan Sukolilo yang terletak di sisi paling timur Kota Surabaya. Menurut Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2008, di Kecamatan Keputih terdapat dua titik sebaran permukiman kumuh yaitu Keputih Timur dan Keputih Tegal. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan memetakan permukiman kumuh serta menganalisis parameter penyebab permukiman kumuh berdasarkan tingkat kualitas permukiman di Kecamatan Keputih. Identifikasi permukiman kumuh dilakukan berdasarkan pemahaman permukiman kumuh dan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara nasional (Crysta & Budisusanto, 2017).

Identifikasi permukiman kumuh dilakukan dengan menentukan kriteria prioritas yang berpengaruh terhadap pemanfaatan permukiman kumuh. Tujuh parameter permukiman kumuh yaitu Direktorat Pembangunan Permukiman Permukiman (Crysta & Budisusanto, 2017)

Munculnya perkampungan perkotaan merupakan fenomena yang banyak terjadi terutama di negara berkembang dan sebenarnya merupakan bentuk asli dari kota-kota di Indonesia. Di sisi lain, perkampungan perkotaan juga padat penduduknya, dan permasalahan berikutnya dapat menyebabkan munculnya permukiman kumuh di perkampungan kota (Budihardjo, 1997).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kondisi yang terjadi di Kelurahan Gandekan memiliki permasalahan yang menarik untuk dijadikan objek kajian karena keunikannya sendiri sebagai salah satu Kelurahan Kota yang memiliki keterkaitan dengan sejarah Kota Semarang, namun di sisi lain saat ini tengah menghadapi beberapa permasalahan baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya maupun yang terkait dengan munculnya kawasan permukiman kumuh di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Gandekan Kota Semarang dan tingkat kekumuhannya.

Hasil kajian analisis terhadap karakteristik permukiman kumuh di Desa Gandekan diketahui bahwa karakteristik permukiman kumuh di Desa Gandekan, dari karakteristik penghuninya merupakan campuran penduduk asli dengan etnis Tionghoa, sebagian di antaranya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang cukup. Perekonomian masih rendah, dan sebagian tempat tinggalnya masih tergolong rumah belum layak huni, yang berarti sarana dan prasarana, terutama untuk kepentingan pribadi masih belum memadai. Sebaliknya dari karakteristik lingkungan diketahui bahwa kondisi lingkungan di dalamnya cenderung tidak teratur dan masih belum memenuhi standar kebutuhan permukiman seperti tidak ada ruang terbuka hijau atau non hijau yang dapat digunakan untuk beraktivitas bersama. Adapun hasil analisis tingkat permukiman kumuh, Desa Gandekan terbagi dalam dua jenis tipologi tingkat permukiman kumuh yaitu tingkat permukiman kumuh sedang dan tingkat permukiman kumuh rendah. (Pigawati, 2015)

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang termasuk dalam kategori kepadatan sangat tinggi yaitu 7.826 jiwa/km², dan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 861.414 jiwa. Sampai dengan tahun 2014, kawasan permukiman di Kota Malang yang telah teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh, terdapat 29 (dua puluh sembilan) lokasi berdasarkan profil Permukiman Kumuh Kota Malang. Kemudian, hal tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Malang. Adanya permukiman kumuh di Kota Malang membuat pemerintah kota bergerak untuk mengatasi masalah tersebut. Permukiman kumuh tersebar di Kota Malang, salah satunya berada di wilayah yang berbatasan dengan daerah aliran sungai Metro. Daerah Aliran Sungai (DAS) Metro di Kota Malang

Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki permasalahan permukiman kumuh. Dalam RTRW Kota Malang 2010 – 2030, wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan lindung sempadan sungai. Berdasarkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), Kota Malang, Kawasan DAS Metro termasuk

sebagai kawasan prioritas 1 dalam Penanganan kawasan permukiman kumuh. Luas kawasan permukiman kumuh di DAS Metro yaitu 111,12 Ha yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan; yaitu Kelurahan. Permasalahan yang utama yang menjadi alasan munculnya permukiman kumuh di kawasan ini adalah keberadaan rumah-rumah milik penduduk yang tumbuh di kawasan sempadan sungai seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kota Malang. Selain itu, belum terpenuhinya sejumlah prasarana dasar permukiman ini berpengaruh besar terhadap kondisi kualitas permukiman. (Sakdiah & Rahmawati, 2021)

Kota Tasikmalaya memiliki kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari , Kota Tasikmalaya . Karakteristik kawasan permukiman yaitu kepadatan hunian sendiri, tinggi penghuni, jarak antar rumah, luas rumah sangat sempit (rata-rata hanya 3-4 bata), dan sebagian rumah besar tidak ada sekat antar kamar, ruang tidur, ruang tamu keluarga, dan dapur, serta tidak memiliki toilet pribadi. Terbentuknya kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu kendala dalam Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif .. Analisis perencanaan kawasan dan wilayah dilakukan secara sistematis yang dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek; 1) perkembangan sosial penduduk, 2) prospek pertumbuhan ekonomi, 3) daya dukung fisik dan lingkungan, selain itu analisis tersebut dilakukan dengan analisis SWOT. Pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Bungursari , Kota Tasikmalaya . Permasalahan permukiman permukiman kumuh melalui rancangan lingkungan kawasan permukiman berwawasan lingkungan, penyelesaian permasalahan kegiatan penggalian material tambang C melalui upaya reklamasi lahan, dan permasalahan permukiman kepadatan penduduk tinggi melalui upaya keseimbangan jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan setempat. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa rancangan penataan permukiman kumuh yang sesuai untuk dikembangkan dalam penataan lingkungan yaitu Model Pembagian Lahan, yaitu penataan ulang atas tanah dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi (Fadjarani & Ruli As'ari, 2018)

Kawasan kumuh yang merupakan tanah-tanah yang secara hukum penuh, disebut “ *kawasan kumuh* ”. Kawasan kumuh juga sering muncul tanpa hak-hak yang jelas, baik secara status kepemilikan maupun secara fungsi ruang kota pada umumnya merupakan tanah-tanah yang bukan tempat tinggal, tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu pada umumnya membawa akibat tidak sebagaimana mestinya kondisi tempat tinggal masyarakat karena tidak tersedianya sarana dan prasarana dasar bagi lingkungan tempat tinggalnya (Wimardana, 2016) .

Kawasan semacam ini menurut berbagai literatur termasuk ke dalam kriteria kawasan kumuh. *Kawasan kumuh* merupakan kawasan permukiman yang dibangun di atas tanah tanpa perlindungan hak milik atas tanah yang dimilikinya, dan masyarakat kumuh merupakan masyarakat yang mendiami atau bermukim di atas tanah yang bukan haknya atau tidak diperuntukkan bagi permukiman, seringkali tumbuh terkonsentrasi pada lokasi terlarang untuk ditinggali dan berkembang pesat sebagai tempat tinggal karena terlambat mengantisipasi dan menempati tanah yang tidak sah (tanah negara). Kelompok *kumuh* pada umumnya merupakan pendatang dari daerah pedesaan atau daerah pinggiran kota yang bermigrasi ke daerah perkotaan untuk mengadu nasib (mencari mata pencaharian) di daerah perkotaan, selain itu secara ekonomi pada umumnya mereka merupakan masyarakat berpendapatan rendah, bekerja di sektor informal, dengan penghasilan yang tidak tetap serta secara sosial mereka berpendidikan rendah, berketerampilan terbatas oleh tatanan sosial masyarakat yang longgar, menghadapi eksklusivitas dari masyarakat sekitarnya dan terbatasnya akses terhadap pelayanan sosial dan administrasi publik (Wimardana, 2016).

Kemudian secara hukum mereka tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum sendiri terutama mengenai tanah yang mereka tempati dan status administratif, dan secara fisik mereka hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Tidak tersedianya sarana dan prasarana lingkungan dasar permukiman, sering terkena banjir serta pencemaran lingkungan lainnya. Pertumbuhan permukiman kumuh dan liar ini terasa semakin pesat, sejak, terutama terjadinya krisis yang bersifat “nasional”, mulai dari krisis moneter, diikuti oleh krisis ekonomi hingga krisis multidimensi yang mengakibatkan bertambahnya besarnya jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan, kondisi ini telah menyebabkan semakin menyebarnya permukiman kumuh dan liar di perkotaan (Pustri LD, 2017).

Hal tersebut terjadi karena banyaknya penduduk kota yang menurun tingkat kesejahteraannya, senantiasa pendatang dari daerah pedesaan yang membawa banyak penduduk miskin juga bertambah. Dari kondisi tersebut diatas terlihat jelas bahwa permukiman kumuh (*slum and squatter*) merupakan buah dari berbagai situasi yang rumit akibat ketimpangan pembangunan. Perlu digali akar permasalahannya dan dicari kemungkinan penyelesaian yang realistis yang dapat disepakati oleh berbagai pihak serta berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal penduduk dan ruang pembangunan kota, dan fenomena keberadaan masyarakat *slum and squatter* di wilayah perkotaan selain telah menjadi salah satu sebab munculnya ketidakjelasan fungsi unsur-unsur lahan wilayah perkotaan, telah pula menyebabkan menurunnya kualitas permukiman perkotaan, sehingga muka kota menjadi tidak jelas, keberadaan kawasan kumuh akan memberikan dampak-dampak

negatif baik ditinjau dari sisi kelayakan kawasan maupun jaminan kualitas hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan (Fadjarani & Ruli As'ari, 2018) .

Faktor penyebab munculnya kawasan kumuh

Sejalan dengan perkembangan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya, kota telah mengalami pergeseran peran, mulai dari paradigma bahwa kota telah berkembang dengan berbagai benturan kepentingan, kemudian muncul paradigma bahwa kota berkembang sebagai suatu proses ekologis budaya, hingga munculnya pandangan bahwa kota adalah tempat berkumpulnya berbagai komunitas dan budaya dengan istilah “ *dunia sosial* ”, sebagaimana yang dikemukakan oleh Howard Becker (1970-an, dari Herbert Gans, 1992; Ernest Burgess, 1925, Chicago School): yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang hidup dalam kota merupakan produk dari budaya-budaya yang diciptakan oleh dunia sosial yang hidup dalam kota tersebut.

Semakin kuatnya daya tarik kota ditambah dengan adanya berbagai keterbatasan dalam perekonomian di pedesaan telah mendorong sebagian besar penduduk pedesaan untuk mengadu nasib di perkotaan (Sakdiah & Rahmawati, 2021) . Perkembangan kota yang semakin pesat fungsinya sebagai pusat kegiatan serta menyediakan pelayanan primer dan sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah pedesaan untuk datang melakukan urbanisasi dengan harapan mendapatkan penghidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lainnya termasuk lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan kurang cukupnya perhatiannya terhadap pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman penduduk serta kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan :

- a) Terjadinya penambahan penduduk yang lebih pesat dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal dan pelayanan primer lainnya secara memadai/sesuai
- b) Pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman yang kurang memadai serta tidak layak huni, di berbagai kawasan cenderung berkembang menjadi permukiman kumuh, dan tidak lagi sesuai dengan standar lingkungan permukiman sehat.
- c) Kurangnya perhatian/partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pemanfaatan kenyamanan dan kemudahan penunjang kegiatan usaha perekonomian.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa masalah perumahan dan permukiman di daerah perkotaan merupakan masalah yang kompleks dan perlu mendapat perhatian, hal ini dikarenakan rumah merupakan kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan yang masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah merupakan aset dalam rangka pembangunan kehidupan sosial dan ekonomi bagi

pemilikinya, sedangkan pengadaan rumah yang dilakukan oleh semua pelaku pada hakikatnya dapat mendorong kegiatan pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu bidang perumahan dan permukiman merupakan program yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional. (Herbert Gans, 1992; Ernest Burgess, 1925, Chicago School)

Faktor Ekonomi

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah permukiman kumuh merupakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah karena keterbatasan akses terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu banyak masyarakat dengan ekonomi rendah yang bekerja di sektor informal. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. Apabila pada suatu saat ekonomi daerah tersebut sendiri rendah maka akan menyebabkan kemunduran pada beberapa aspek yang lain. Karena pendapatan masyarakat rendah maka masyarakat kesulitan dalam mendapatkan rumah layak huni bagi dirinya dan keluarganya. Secara ekonomi, dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil rendah, kemungkinan kemampuan masyarakat penghuni untuk mewujudkan perbaikan lingkungan tempat tinggalnya sangat tidak memungkinkan (Padyansari dkk, 2023) . Sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya, mereka untuk membangun peruntukan tempat tinggal dengan kondisi apa adanya sehingga dapat bertahan hidup di daerah perkotaan. Akibat dari ketidakmampuan masyarakat dalam faktor ekonomi untuk mendapatkan rumah layak huni maka menambah masalah bagi pemerintah terkait pembangunan permukiman kumuh di daerah perkotaan.

Faktor geografis dan lingkungan

Faktor geografis dan lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan letak dan ketersediaan lahan, yang saat ini lahan perkotaan apalagi dengan peruntukan lahan sebagai lahan kawasan perumahan semakin sulit untuk diperoleh. Sehingga golongan masyarakat berpendapatan tinggi rendah semakin sulit untuk memperoleh lahan di kawasan perkotaan karena terjadi spekulasi tanah, penguasaan lahan didominasi oleh golongan tertentu yang tidak sesuai dengan aspek hukum kepemilikannya, dan ketidakjelasan kebijakan dari pemerintah (Padyansari et al., 2023) . Hal inilah yang menyebabkan masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi rendah dalam kemampuannya, mereka untuk mendirikan bangunan peruntukan tempat tinggal dengan kondisi apa adanya dengan keadaan di bawah standar dalam permukiman yang tidak layak untuk dapat bertahan hidup.

Faktor Psikologis

Manusia dan lingkungan pada hakikatnya akan selalu melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, karena sudah menjadi ketidakterkaitan yang dapat dipisahkan. Interaksi yang terjadi dapat berupa saling membantu atau saling menguasai. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membuat manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah suatu kelompok berbasis dari satu rumah ke rumah lainnya yang kemudian disebut sebagai permukiman (Sari & Ridlo, 2022) . Masyarakat Indonesia identik dengan kodratnya sendiri dengan berbagai norma sosial yang melekat pada setiap individu. Tidak terkecuali pada lingkungan masyarakat yang tinggal di daerah permukiman kumuh. Adanya perbedaan ini sering terjadi kesalahpahaman antara setiap individu. Tidak jarang terjadi jika antar individu dalam suatu daerah permukiman memiliki rasa tidak percaya satu dengan yang lainnya. Masyarakat tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu masalah. Karena yang dipikirkan hanyalah bagaimana mereka dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut.

Faktor Fisik Lingkungan

Perkembangan permukiman kumuh di daerah perkotaan pada umumnya disebabkan karena faktor fisik lingkungan yang tidak memadai. Faktor fisik lingkungan ini meliputi sistem drainase, sistem pembuangan limbah, kondisi lahan dan bangunan, serta jaringan-jaringan lainnya yang sejak awal sebelum perkembangan permukiman kumuh sudah menjadi suatu permasalahan yang ada pada suatu daerah. Faktor penyebab utama permukiman kumuh adalah kualitas bangunan, hal ini disebabkan jika usia bangunan sudah tua maka kualitas bangunan akan ikut menurun, selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas bahan bangunan tersebut (Wahyu Saputra et al., 2022) . Seiring berjalannya waktu, permukiman di sekitar daerah tersebut juga akan terkena dampaknya. Jika tidak dilakukan pengendalian maka akan mengakibatkan kondisi daerah tersebut semakin memburuk . Perkembangan daerah permukiman kumuh tidak dapat dicegah dan tidak dapat dihindari dalam perkembangan daerah perkotaan. Karena daerah permukiman kumuh telah menjadi bagian dari struktur ruang kota.

Kriteria atau Indikator Regional

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (2022) . Dalam buku Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Permukiman Kumuh Kegiatan Kotaku kriteria atau indikator kawasan permukiman kumuh dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

A. Aspek Fisik

1. Dilihat Dari Jalan Lingkungan

- a) Lingkungan jalan jaringan Tidak melayani seluruh lingkungan jalan perumahan atau pemukiman

Jaringan jalan lingkungan No melayani seluruh lingkungan jalan perumahan atau permukiman dikondisikan sebagai lingkungan jalan perumahan atau permukiman No dilayani oleh lingkungan jalan.

- b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

Kualitas lingkungan jalan yang buruk adalah kondisi sebagian atau seluruh kerusakan lingkungan jalan terjadi pada permukaan jalan

2. Dilihat Dari Lingkungan Drainase

- a) Lingkungan Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menyebabkan Genangan Air.

Lingkungan Drainase Tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana lingkungan jaringan drainase tidak mampu mengalirkan luapan air sehingga menimbulkan genangan yang tingginya lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 kali dalam setahun (Crysta & Budisusanto, 2017) .

- b) Drainase Tidak Tersedia

Ketidakterediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan saluran lokal tidak tersedia.

- c) Tidak Terhubung Dengan Sistem Drainase Perkotaan

Tidak tersambung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran setempat tidak tersambung dengan saluran-saluran dalam hirarki di atas sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan air.

- d) Tidak Terawat Sehingga terjadi Penumpukan Limbah Padat dan Cair Di Dalam tersebut.

Tidak Terawat Sehingga terjadi Penumpukan Limbah Padat dan Cair di Dalam merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase belum dilaksanakan Baik berupa ;

1. Perawatan rutin

2. Perawatan berkala

- e) Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Kualitas Drainase Konstruksi Lingkungan Buruk adalah kondisi dimana kualitas drainase konstruksi buruk karena berupa tanah galian tanpa ada bahan pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

3. Dilihat Dari Pengelolaan Air Limbah

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Standar Teknis yang Berlaku

Sistem pengelolaan air limbah belum memenuhi standar teknis yang berlaku yaitu kondisi dimana pengelolaan air limbah di lingkungan perumahan atau permukiman belum mempunyai sistem yang memadai yaitu terdiri dari jamban/closet yang terhubung dengan septic tank baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

b) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Belum Memenuhi Persyaratan Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi syarat teknis yang ditetapkan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah pada Perumahan atau Permukiman Dimana ;

- a. leher lemari angsa Tidak terhubung ke tangki septik atau
- b. Belum tersedianya sistem pengelolaan sampah secara lokal/terpusat

4. Dilihat Dari Pengelolaan Sampah

a) Prasarana dan Sarana Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Sampah prasarana dan sarana tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu kondisi dimana sampah prasarana dan sarana di lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana berikut ;

- a. Tempatkan sampah dengan pilihan sampah pada timbangan rumah tangga atau tangga rumah
- b. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada lingkungan berskala besar
- c. Keranjang sampah dan/atau truk sampah dalam skala lingkungan

b) Sistem Pengelolaan Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Persyaratan Teknis

Sistem Pengelolaan Sampah Tidak memenuhi syarat teknis yaitu syarat dimana pengelolaan sampah pada lingkungan perumahan atau pemukiman tidak memenuhi syarat sebagai berikut ;

- a. Penahanan dan seleksi domestik
- b. Lingkungan koleksi dan
- c. Lingkungan pemrosesan

5. Aspek Sosial dan Ekonomi

a) Pendapatan Komunitas

Tingkat Pendapatan Rendah Sering Diasosiasikan dengan Status Permukiman Kumuh. Banyak Penghuni Permukiman Kumuh Memiliki Pekerjaan Tidak Tetap dan Pendapatan di Bawah Standar (Pricilia, 2021) .

b) Partisipasi publik

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Lokal Menunjukkan Potensi di Daerah (Pricilia, 2021)

Cara dan Infrastruktur

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses usaha yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal tersebut tidak tersedia maka segala kegiatan yang dilaksanakan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana (Setiadi, 2017) .

Moenir (1992:119) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang berjenis peralatan, perlengkapan kerja dan sarana yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan kerja, maupun dalam rangka kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan organisasi. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir tersebut secara jelas memberikan arahan bahwa sarana dan prasarana yang ada merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan. Alat yang baik adalah adalah perlengkapan pembantu atau perlengkapan utama, yang mana kedua-duanya berfungsi untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dikerjakan yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terlaksananya suatu proses (usaha , gedung, dan proyek).

Di bawah ini merupakan fungsi sarana dan prasarana utama, yaitu sebagai berikut.

1. Mempercepat proses pelaksanaan kerja sehingga mampu menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas Barang bagus dan juga layanan.
3. Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin.
4. Lebih sederhana atau mudah dalam pergerakan pengguna atau aktor.
5. Ketentuan pengaturan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menciptakan rasa nyaman bagi orang yang berminat.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang yang berminat menggunakannya.

Memahami Drainase

Drainase berasal dari Bahasa Inggris Drainage yang berarti menguras, membuang atau mengalihkan air. Menurut HA Halim Hasmar, drainase secara umum diartikan sebagai ilmu pengaturan yang mempelajari sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air dalam rangka pemanfaatan tertentu, baik yang berasal dari air hujan, rembesan atau yang lainnya di suatu tempat, sehingga fungsi tempat tersebut tidak terganggu. Suripin, M.Eng (2004), drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang/mengalirkan air. Secara umum drainase diartikan sebagai suatu rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu wilayah atau lahan, sehingga lahan tersebut dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak dikehendaki pada suatu wilayah, sekaligus cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut (Fernando Nadyana Yustika, 2019).

Tujuan Drainase

- a. Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman.
- b. Pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan dengan cara yang aman, lancar dan efisien serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan.
- c. Dapat mengurangi genangan-genangan air yang menjadi tempat bersarangnya nyamuk malaria dan penyakit-penyakit lainnya, seperti demam berdarah serta penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh kurang sehatnya lingkungan pemukiman.
- d. Untuk memperpanjang umur ekonomis berarti memperlancar perbendaharaan antara lain : jalan-jalan, kawasan-kawasan pemukiman, perdagangan, dari kerusakan dan gangguan kegiatan akibat tidak berfungsinya sarana drainase.

Fungsi drainase

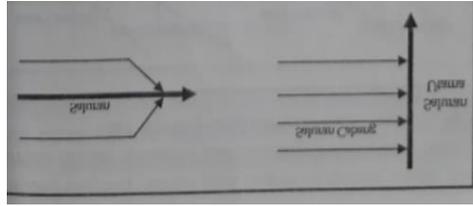
- a. Menguras air permukaan dari badan air terdekat sesegera mungkin agar tidak terjadi banjir atau merendam kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat dan prasarana perkotaan.
- b. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air dan kehidupan perairan.
- c. Rembesan air permukaan Untuk menjaga kelestarian air tanah.

Pola Jaringan Drainase yang baik

Pada sistem jaringan drainase terdiri dari sejumlah saluran yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu pola jaringan. Dari bentuk pola jaringannya dapat dibedakan sebagai berikut :

Pola paralel

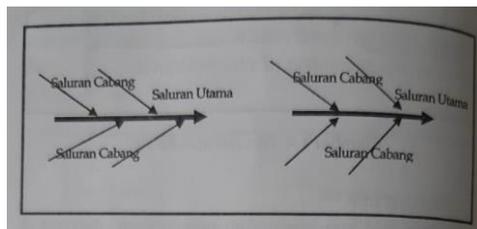
Pola dimana saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang pada ujung saluran cabang dibelokkan menuju saluran utama pada pola saluran sejajar cabangnnya cukup banyak dan pendek.



Gambar 1 Jaringan Paralel

Pola Alami

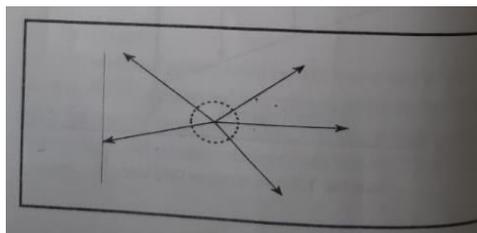
Pola jaringan drainase hampir lengkap sama dengan pola siku, dimana sungai sebagai saluran utama berada di bagian tengah. Akan tetapi cabang saluran tidak selalu berbentuk siku terhadap saluran utama.



Gambar.2 Jaringan Alamia

Pola Radial

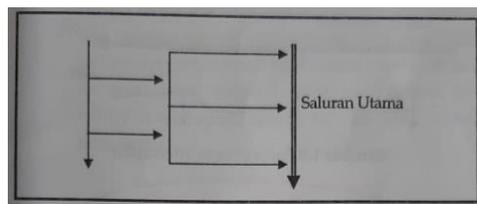
Pola jaringan drainase yang mengalirkan air dari pusat air yang memancar ke berbagai arah perbukitan.



Gambar 3 Jaringan radial

Pola jaring

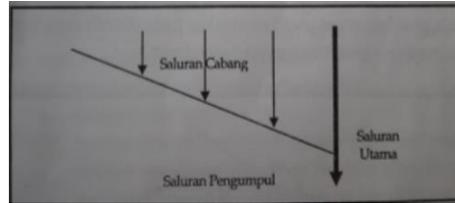
Pola drainase yang mempunyai saluran pembuang mengikuti arah jalan raya



Gambar 4 Jaringan Jaringan

Pola siku

Pola dimana cabang saluran membentuk sudut siku-siku seperti pada gambar dibawah ini biasanya terbentuk pada daerah yang topografinya agak tinggi dari sungai dimana sungai merupakan saluran utama.



Gambar 5 Jaringan siku

Teori Komposisi Area

Johan Silas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan permukiman kumuh adalah :

- a. Kawasan permukiman padat penduduk merupakan kawasan yang dalam proses pembentukannya dikarenakan keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul persaingan dalam pemanfaatan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman padat penduduk merupakan embrio permukiman kumuh.
- b. Daerah yang letaknya tersebar secara geografis tertekan perkembangannya yang semula berupa kota yang baik, lambat laun menjadi daerah kumuh, yang menjadi penyebab tersendatnya mobilitas sosial ekonomi.
- c. Dalam tulisannya tentang Surabaya, perkembangan dan keberadaan serta permukiman kumuh, Johan silas menjelaskan tentang kriteria permukiman utama kumuh / marginal :
 - 1) Berada di lokasi ilegal
 - 2) Kondisi fisik kurang baik, pendapatan penduduk sangat rendah
 - 3) Tidak dapat melayani berbagai fasilitas kota
 - 4) Kehadiran yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum, (kecuali yang berkepentingan) Lebih lanjut John Silas menegaskan, permukiman marjinal selalu menempati lahan yang dekat dengan pasar kerja (non formal); adanya sistem transportasi yang memadai dapat dimanfaatkan dengan cara yang mudah meskipun tidak selalu murah.
 - 5) David Satterwhaite menyatakan bahwa permukiman marjinal tidak sah dalam dua hal, yaitu pertama, tanah yang dihuni tidak sah, dan kedua, lokasi dan bangunan yang dibangun dan dikembangkan tidak sah bertentangan dengan penggunaan tanah (zonasi).

Secara umum permukiman marginal dikelompokkan menjadi empat (4) jenis besar, yang secara berurutan terdiri atas :

- 1) Situasinya cukup baik dan memiliki peluang untuk diresmikan (dilegalkan).
- 2) Situasinya sudah bagus, tetapi ada kesulitan untuk menjadi resmi, meskipun tidak ada harga mati.
- 3) Situasinya sangat terbatas dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengadakan pembangunan lebih lanjut .
- 4) Situasinya sangat mendesak, oke? diam atau bergerak.

Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan suatu kawasan yang berisi kawasan permukiman, perkantoran serta dijadikan sebagai pemusatan segala kegiatan atau aktivitas baik jasa dan pelayanan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, maupun pusat kegiatan pemerintahan. Kawasan kota merupakan pusat dari penyaluran pelayanan atau disebut sebagai pusat pertumbuhan (Adisasmita , 1989). Berdasarkan pernyataan tersebut kota akan mengalami pertumbuhan berdasarkan kebutuhan penduduknya. Pada kawasan perkotaan, kegiatan pertanian tidak menjadi kegiatan utamanya. Banyaknya kegiatan yang dilakukan di kawasan perkotaan mengakibatkan intensitas penggunaan lahan cukup tinggi. Seiring berjalannya waktu kawasan perkotaan akan terus berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat. Sehingga secara perlahan kawasan perkotaan akan selalu mengalami perubahan baik dalam kondisi fisik lingkungannya maupun kondisi sosialnya. Perkembangan kawasan perkotaan apabila tidak terarah dan terencana sedini mungkin, maka akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan tersebut.

Desa Kota

Kampung Kota secara umum dikenal sebagai suatu permukiman yang tumbuh di wilayah perkotaan tanpa adanya perencanaan prasarana dan jaringan perekonomian kota (Nursyahbani & Pigawati , 2015). Pada umumnya kampung kota ini dihuni oleh masyarakat pendatang yang kemudian mendirikan tempat tinggal yang saling berdekatan dalam suatu wilayah. Kondisi kampung kota biasanya memiliki ketidakteraturan bangunan, karena pada saat mendirikan bangunan masyarakat tidak cukup memperhatikan kondisi fisik lingkungan sekitar maupun aspek pendukung lainnya. Sehingga seiring berjalannya waktu kampung kota semakin berkembang sehingga berdampak buruk bagi lingkungan bahkan bisa saja berdampak menjadi daerah kumuh karena tidak memperhatikan aspek penting dalam pembangunannya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu kegiatan penelitian yang lebih rinci, Nassir (1988:51-52), metode penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang ada dan menginterpretasikan objek regional permukiman kumuh di Kecamatan Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi yang disebabkan oleh belum berfungsinya drainase.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025 atau setelah keluarnya surat keterangan studi dari fakultas teknik, uniknya, wilayah yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Pasar Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pengamatan penelitian di Desa Pasar Cerenti yang memiliki permasalahan berupa banyaknya drainase yang tidak berfungsi, permasalahan pengelolaan sampah yang kurang baik, jalan lingkungan yang sudah dialihfungsikan dan permasalahan sampah yang kurang terkelola dengan baik, sehingga mengganggu kenyamanan warga yang tinggal di lokasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar Butar, C., & Setiawan, R. P. (2012). *Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya melalui pendekatan partisipasi masyarakat*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/281837596_Penataan_Lingkungan_Permukiman_Kumuh_di_Kecamatan_Semampir_Kota_Surabaya_Melalui_Pendekatan_Partisipasi_Masyarakat
- Crysta, E. A., & Budisusanto, Y. (2017). Identifikasi permukiman kumuh berdasarkan tingkat RT di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 2–6. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24173>
- Fadjarani, S., & As'ari, R. (2018). Penataan permukiman kumuh berbasis lingkungan. *Jurnal Geografi*, 15(1), 56–67. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/index>
- Harahap, A. R. (2019). Potret masyarakat di daerah kumuh (Studi di Desa Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung). *Keberlanjutan (Swiss)*, 11(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- Joenso, C., & Sari, S. R. (2020). Permukiman kumuh perkotaan (Studi kasus permukiman Lampu Satu).
- Julianto, H., & Jumario, N. (2017). Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap penataan kawasan kumuh pesisir Kota Tarakan. *Potensi: Jurnal Teknik Sipil*, 19(2), 65–74. <https://doi.org/10.35313/potensi.v19i2.897>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Buku saku identifikasi dan penilaian lokasi permukiman kumuh kegiatan Kotaku*. Diakses dari <https://ibmpkp.pu.go.id/>

- Padyansari, R., Rahayu, M. J., & Suminar, L. (2023). Karakteristik dan faktor prioritas penyebab permukiman kumuh di kawasan permukiman Girlibanji (Bantaran Sungai Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas. *Desa-Kota*, 5(2), 100. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i2.72271.100-111>
- Pigawati, R. N. B. (2015). Studi karakteristik kawasan kumuh di kelurahan perkotaan (Studi kasus: Kelurahan Gandekan, Semarang). *Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(2), 267–281.
- Pricilia, L. (2021). Identifikasi kawasan kumuh dan komunitas di Aldeia 12 Divino dan Aldeia Tahu Laran Suco Caicoli Posto Administratif Vera Cruz Municipality Dili Timor-Leste. *Jurnal Studi Perkotaan*, 1, 1. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4636/>
- Pustri, L. D. (2017). *Pelatihan perencanaan partisipatif dalam pengembangan kawasan kumuh Meranti di Kota Pekanbaru*.
- Sakdiah, C., & Rahmawati, D. (2021). Strategi penanganan permukiman kumuh di daerah aliran sungai Metro Kota Malang berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.56280>
- Saputra, W., Sukmaniar, & Hermansyah, M. H. (2022). Permukiman kumuh di perkotaan: Penyebab, dampak, dan solusi. *Jurnal Ilmu Lingkungan (Esjo)*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>
- Sari, A. R. S., & Ridlo, M. A. (2022). Studi pustaka: Identifikasi faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. *Jurnal Studi Spasial*, 1(2), 160. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Setiadi, A. (2017). Pola penanganan infrastruktur di kawasan kumuh (Studi kasus daerah aliran sungai Winongo). *Seminar Nasional-1 BMPTTSSI - KoNTekS 5*, 1.
- Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). Implementasi program Kota Bebas Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi kawasan kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Sawala: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 74–94. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.1617>
- Syam, M. (2017). Identifikasi kawasan kumuh dan strategi penanganannya di permukiman di Desa Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. *Jurnal Perencanaan Kota*, 164. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7141/1/Muhajir_Syam_opt.pdf
- Uar, E. D. (2016). Strategi pengelolaan permukiman kumuh. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8, 127–144.
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan penanganan permukiman kumuh (Studi penentuan kawasan prioritas peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>
- Wimardana, A. S. (2016). Faktor prioritas penyebab kekumuhan pada kawasan kumuh di Kecamatan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), 3–8.
- Yustika, F. N. (2019). Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Kalirasi, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. *Jurnal Permukiman*, 8(2), 189–193.